

Membangun Strategi Yurisdiksi Kokoh dan Rencana Investasi untuk Mengurangi Deforestasi dan Mempromosikan Pengembangan Rendah Emisi

Concept Paper untuk Mendampingi Template Proposal GCF Task Force

1. Pengantar	2
2. Latar belakang GCF dan Pendekatan Yurisdiksi	3
3. Strategi Yurisdiksi Kokoh dan Rencana Investasi	6
Perencanaan “Jalur”	7
Aspek penting dari proses perencanaan strategis	8
Strategi regional	9
Risiko yang terkait dengan strategi yurisdiksi dan rencana investasi	10
4. Kegiatan yang Didukung di bawah Jendela Pendanaan A	11
Pengembangan strategi yurisdiksi baru dan rencana investasi	12
Elaborasi dan penyempurnaan strategi yurisdiksi dan rencana investasi yang ada	12
Pengembangan produk pelengkap dan proposal	13
Monitoring, evaluasi, dan pelaporan	14
5. Langkah yang Diharapkan untuk Berpartisipasi dalam Inisiatif ini	15
Garis dasar (self assessment awal)	15
Melibatkan pemangku kepentingan	16

1. Pengantar

Gugus Tugas *Governors' Climate and Forests* (GCF) adalah sebuah kolaborasi subnasional yang unik berasal dari tiga puluh delapan negara bagian dan provinsi dari sepuluh negara yang bekerja untuk membangun program-program yang kokoh sesuai luas yurisdiksi REDD + dan pengembangan kadar emisi rendah. Kolaborasi ini berusaha menghubungkan program-program ini dengan akses keuangan masyarakat dan swasta. Lebih dari sepertiga dari hutan tropis dunia berada di negara bagian dan provinsi GCF, termasuk sebagian besar wilayah Amazon di Brasil dan Peru dan sebagian besar hutan di Indonesia.

Pada 2014, Gubernur GCF mengadopsi Deklarasi Rio Branco, memberi sinyal kepada dunia bahwa mereka siap untuk melakukan lebih dari sekadar upaya memerangi perubahan iklim, melindungi hutan, dan meningkatkan tingkat kehidupan warga. Deklarasi Rio Branco mendorong para penandatanganannya untuk mengurangi deforestasi hingga 80% pada tahun 2020, melalui dukungan keuangan jangka panjang yang cukup dan tersedia.

Deklarasi ini berjanji kepada komunitas masyarakat adat dan tradisional sebuah “pembagian layak” atas setiap dana pembayaran yang berasal dari kinerja yang diterima negara bagian dan provinsi sebagai hasil dari usaha mereka untuk mengurangi deforestasi. Deklarasi ini juga meminta para pelaku dari rantai organisasi masyarakat adat untuk bermitra dengan negara bagian dan provinsi GCF untuk membangun program yurisdiksi bagi pengembangan emisi rendah yang berkelanjutan, setara dan sejalan dengan kebijakan dan program nasional.

Pada pertemuan tahunan GCF 2015 di Barcelona, Pemerintah Norwegia mengumumkan sebuah janji senilai USD 25 juta kepada GCF sebagai pengakuan atas Deklarasi Rio Branco dan kepemimpinan berkelanjutan negara bagian dan negara bagian GCF.

Norwegia telah memilih Tim REDD+ dari UNDP di Jenewa untuk mengelola dan menerapkan janjinya. Tujuan dari janji Norwegia berfokus untuk mendukung negara-negara dan pemilik kawasan hutan tropis GCF yang inovatif dalam memenuhi komitmen Deklarasi Rio Branco. Caranya dengan mengembangkan/memperbaharui strategi yurisdiksi untuk REDD+ dan pengembangan emisi rendah dan mengkatalisasi peluang pembiayaan yang transformatif. Ini akan dilakukan melalui dua jendela pendanaan:

A. Jendela Pendanaan Strategi Yurisdiksi dan Rencana Investasi GCF

B. Jendela Pendanaan Inovasi GCF

Catatan konsep ini memberikan konteks yang relevan dengan skema dari Jendela Pendanaan A: Strategi Yurisdiksi dan Rencana Investasi GCF, mencakup area sebagai berikut:

- Latar belakang GCF dan Pendekatan Yurisdiksi
- Strategi Yurisdiksi Kokoh dan Rencana Investasi

- Kegiatan yang Didukung di Bawah Jendela Pendanaan A
- Langkah yang Diharapkan untuk Berpartisipasi dalam Inisiatif ini

2. Latar belakang GCF dan Pendekatan Yurisdiksi

GCF saat ini mencakup tiga puluh lima negara bagian dan provinsi pemilik hutan tropis dari delapan negara (Brasil, Kolombia, Pantai Gading, Ekuador, Indonesia, Meksiko, Nigeria, dan Peru), dengan kelompok besar negara bagian dan provinsi di Brasil, Indonesia, Meksiko, dan Peru.¹

Teori perubahan GCF berawal dari pemikiran dasar bahwa negara bagian dan provinsi (dan pelaku subnasional pada umumnya) adalah pemain kunci dalam upaya global untuk melindungi hutan dan menghadapi isu perubahan iklim. Mereka melakukan banyak kerja keras yang terkait dengan mitigasi perubahan iklim dan adaptasi.

Yurisdiksi subnasional mewakili tingkat pemerintahan teritorial yang penting dan seringkali terdesentralisasi. Yurisdiksi ini terkait erat dengan realitas lokal, pelaku penggunaan lahan, dan investasi. Pemerintah-pemerintah ini dapat memanfaatkan sumber daya dengan lebih tepat sasaran untuk menargetkan intervensi REDD+ secara lebih tepat. Selain itu, inisiatif di tingkat yurisdiksi memberikan kesempatan untuk mengkonsolidasikan upaya dan menyelaraskan kepentingan di berbagai pemangku kepentingan (pemerintah, bisnis, masyarakat) dan sektor-sektor.

Pendekatan semacam itu tidak hanya penting untuk mencegah kebocoran tetapi juga menjadi sumber eksperimen dan inovasi kebijakan yang penting. Misalnya, proyek pembayaran untuk layanan ekosistem (*Payment for Ecosystem Services/PES*) jika ditingkatkan namun tanpa penerapan zonasi lahan di seluruh wilayah kerja, bisa saja hasilnya justru melepaskan emisi ke luar area yang dicakup oleh proyek ini, sehingga membatalkan dampak mitigasi.

Keberadaan GCF sejak awal telah berada di garis depan upaya untuk mengembangkan dan menerapkan program yurisdiksi untuk REDD+ dan pengembangan emisi rendah. Berbeda dengan proyek individual lain, program yurisdiksi mengambil pendekatan holistik, mencakup dan menyeluruh terhadap tata guna hutan dan tata guna lahan. Ketika berhasil, program semacam itu menyediakan platform untuk penyelarasan dan koordinasi kebijakan lintas sektor dengan proses nasional, serta kerangka kerja untuk membawa banyak kegiatan sektor publik dan swasta bersama-sama ke dalam pendekatan komprehensif untuk pengembangan emisi rendah.

Melalui pengarusutamaan REDD+ dan pengembangan emisi rendah ke dalam program dan kebijakan pemerintah, maka pendekatan yurisdiksi berupaya mencapai pengurangan emisi dalam skala besar untuk memastikan ketahanan dan keberlanjutan institusional dan politik. Seiring kemajuan dan dukungan terhadap program yurisdiksi, para-pihak juga memberikan bukti konsep dan model kepada yurisdiksi lain serta menunjukkan manfaat politik nyata dari investasi dalam perjuangan melawan deforestasi dan perubahan iklim. Semuanya berfungsi untuk memperkuat dan menegaskan komitmen individu dan kolektif dan untuk lebih memanfaatkan dukungan bagi inisiatif subnasional dalam melindungi hutan dan mengurangi emisi.

¹ Seluruh jaringan GCF saat ini terdiri dari tiga puluh delapan anggota dari sepuluh negara, yang terdaftar di atas dan termasuk Amerika Serikat dan Catalonia.

Kami sadari upaya untuk membangun dan mempertahankan program yurisdiksi yang sukses kerap menghadapi banyak tantangan. Paling tidak, membangun program yurisdiksi yang kuat sebagai dasar untuk mempengaruhi perubahan transformatif dalam tata guna lahan dan tata kelola hutan di negara bagian atau provinsi manapun memerlukan kepemimpinan dan komitmen yang kuat dari gubernur dan orang-orang yang ditunjuk secara politis, dikombinasikan dengan kemampuan organisasi yang kuat di jajaran pemerintahan dan jaringan mitra masyarakat madani yang lebih luas.

Sebagaimana dapat dipahami, apa yang disebut sebagai kemampuan organisasi untuk implementasi kebijakan sebenarnya adalah kemampuan organisasi untuk membekali, mengusahakan, dan mendorong para-pihak melakukan hal-hal yang benar pada saat yang tepat untuk memajukan hasil kebijakan normatif. Kemampuan-kemampuan tersebut memang dibutuhkan namun tidak mutlak menjadikannya kondisi yang memadai untuk berhasil. Pendekatan itu dapat dipandang sebagai komponen kunci dari kondisi perubahan transformatif namun tidak dengan sendirinya menjamin bahwa perubahan tersebut akan terjadi.

Pengalaman GCF menunjukkan beberapa yurisdiksi kerja GCF mengalami kemandekan karena persoalan kapasitas dan kemampuan, dan sedikit sekali dari para gubernur GCF yang telah melihat keuntungan politik dari menghadirkan komitmen yang kuat untuk mengurangi deforestasi. Namun, harus disebutkan ada pula yurisdiksi GCF yang mampu menggabungkan komitmen gubernur yang kuat dengan kemampuan organisasi yang kuat.

Lebih kompleks lagi ada pula sejumlah yurisdiksi yang menggabungkan sebetulnya komitmen kuat dengan kemampuan dan kapasitas yang lemah dan juga sebaliknya. Bagaimana memahami bagian mana dari yurisdiksi yang berkaitan dengan komitmen dan kemampuan, sepertinya harus menjadi pertimbangan penting dalam mencari dan memutuskan dukungan untuk strategi yurisdiksi dan rencana investasi.

Amat penting untuk diketahui bahwa ada beragam institusi dan bentuk organisasi yang terdiri dari program-program yurisdiksi yang sukses. Dengan kata lain, tidak ada "satu cara yang benar" untuk membangun pendekatan yurisdiksi berkinerja tinggi. Kemampuan yurisdiksi tertentu akan didorong oleh institusi vernakular di masyarakat dan aturan informal yang ada di dalam pemerintah tertentu di antara jaringan aktor yang lebih luas yang terlibat dalam upaya yurisdiksi. Pelbagai model dan pihak semuanya telah saling mempengaruhi dan memperkuat sehingga menyediakan model-model penerapan pelajaran dan praktik terbaik yang bisa diambil dari pengalaman yurisdiksi lainnya.

Dengan berbagai komitmen dan kemampuan di berbagai yurisdiksi yang berbeda ini, setiap dukungan untuk pengembangan program yurisdiksi harus dimulai dengan kesediaan untuk melihat perbedaan-perbedaan pemikiran. Selain itu, sangat penting bahwa pendekatan menyeluruh dapat cukup fleksibel untuk mengakomodasi titik awal yang berbeda dan konteks khas dari masing-masing anggota GCF individual.

Pendekatan yurisdiksi yang efektif terhadap REDD+ /LED yang bagus harus berbasis masalah, termasuk memperhatikan dengan seksama kondisi di yurisdiksi yang menimbulkan masalah dalam perumusan kebijakan dan, yang lebih penting, berorientasi pada implementasi. Jika berfokus pada masalah yang penting dalam konteks spesifik yurisdiksi yang dimaksud, dapat memaksa pemimpin

pemerintahan, manager, pegawai negeri, dan mitra masyarakat sipil untuk mengajukan pertanyaan tentang cara-cara lama dalam melakukan sesuatu dan mempromosikan penyelidikan yang penting ke dalam skema alternatif. Sering kali menemukan dan menyesuaikan solusi dengan masalah spesifik di tingkat yurisdiksi lokal dapat dilakukan dengan kemampuan jaringan kolektif yang diperoleh melalui proses trial and error.

Dalam praktiknya, pendekatan yurisdiksi REDD + / LED harus:

Menyelaraskan dan kemudian memobilisasi kemampuan di berbagai departemen dan program pemerintah untuk mencapai efektivitas pelaksanaan yang lebih tinggi (juga jaringan mitra yang lebih luas), daripada sekadar mengejar proyek dan aktivitas individual yang tersebar di negara bagian atau provinsi, yang seringkali melibatkan aktor yang berbeda dengan prioritas yang berbeda. Memang, tidak selalu ada hubungan langsung dan linier antara proyek tertentu dan pengurangan emisi. Sebaliknya, pengurangan emisi dihasilkan dari serangkaian hubungan timbal balik dari berbagai kebijakan yang memungkinkan (contoh: koordinasi antar institusi) dan investasi langsung yang dilakukan di lapangan (contoh: subsidi kepada petani). Selanjutnya, kebijakan dan tindakan individual yang ditempuh secara terpisah dan sendirian dapat meningkatkan risiko kegagalan dan kebocoran. Pelaksanaan kebijakan dan investasi di lapangan yang dilakukan secara terkoordinasi dalam skala besar meningkatkan potensi efektivitas dalam menangani masalah. Sebagai bagian dari usaha mereka untuk mengembangkan strategi yurisdiksi atau rencana investasi di dalam program yurisdiksi akan memerlukan **teori perubahan** yang jelas (dijelaskan lebih lanjut di bawah) yang mengidentifikasi keterkaitan ini.

Meningkatkan pembelajaran dan generasi pengetahuan yang dapat ditangkap dalam pengaturan pemantauan, pelaporan, dan evaluasi program dan sistem manajemen adaptif. Sementara untuk menilai efektivitas atau efisiensi sebuah proyek dalam memberikan output tertentu (misalnya, pengeluaran per hektar untuk skema pembayaran layanan ekosistem (PES)) relatif mudah, yurisdiksi masih perlu untuk lebih memahami keterkaitan antara kebijakan yang berbeda, serta dampaknya terhadap pengemudi dan akhirnya pada emisi, yang dipantau lebih baik di tingkat yurisdiksi. Pembelajaran ini sangat penting, dan GCF dapat menjadi platform untuk menyebarkan pelajaran dalam hal pemantauan dan evaluasi dan pengelolaan adaptif untuk program yurisdiksi, dan memfasilitasi pembelajaran “Selatan-Selatan” tentang bagaimana merancang dan mengelola program kompleks semacam itu. Tingkat yurisdiksi adalah skala ideal untuk kebijakan percontohan yang kemudian dapat ditingkatkan ke tingkat nasional atau direplikasi di yurisdiksi lain tanpa meningkatkan total biaya pelaksanaan.

Meningkatkan efisiensi biaya, leverage politik, dan kapasitas untuk mengelola risiko. Koordinasi konsolidasi melalui pendekatan yurisdiksi secara keseluruhan dapat memungkinkan yurisdiksi dan mitra keuangan (donor dan investor) untuk lebih baik:

- Mengkoordinasikan berbagai inisiatif dan pemangku kepentingan yang ada dalam wilayah, mendukung penyelarasan menuju tujuan bersama;
- Fokuskan usaha transformatif yurisdiksi berdasarkan kerangka kerja dan kerangka hasil kerja tunggal, dengan prioritas yang ditetapkan dengan jelas;
- Memantau dan mengevaluasi kemajuan dengan menggunakan metrik kinerja, alat dan metodologi yang harmonis dan dalam beberapa kasus sistem yang sama (misalnya sistem pemantauan hutan atau sistem ketertelusuran komoditas); dan

- Laporkan kemajuan dengan cara yang memungkinkan terjadinya konsolidasi dan inventarisasi bersama.

Pendekatan ini dapat memanfaatkan banyak sumber pembiayaan, dan melibatkan banyak mitra yang mendukung banyak kegiatan tanpa semua sumber daya mengalir melalui satu saluran. Selain itu, ia memiliki potensi untuk meningkatkan:

- Penguasaan politik untuk mempromosikan keselarasan dengan tujuan pembangunan rendah emisi melalui alokasi strategis dan terkoordinasi (keberhasilan pengembangan emisi rendah memerlukan kemauan politik dan komitmen untuk melakukan reformasi oleh semua pemangku kepentingan di yurisdiksi mitra);
- Kelebihan finansial sumber daya, dengan memfasilitasi perpaduan instrumen keuangan yang lebih terkoordinasi (pinjaman, hibah, jaminan, ekuitas); dan
- Dampak terukur, yang pada gilirannya dapat meningkatkan dukungan politik dan menciptakan peluang sumber daya tambahan.

Contoh strategi dan proses perencanaan yurisdiksi tersedia di Database Pengetahuan Satuan Iklim dan Hutan Gubernur.

3. Strategi Yurisdiksi Kokoh dan Rencana Investasi

Sebagaimana dipahami, strategi yurisdiksi REDD + / LED adalah kerangka kerja strategis atau "meta-strategi" untuk perencanaan dan implementasi pengembangan emisi rendah yang merespons tantangan dan peluang tertentu di dalam yurisdiksi. Ini dibangun berdasarkan keseluruhan kerangka kebijakan yurisdiksi (rencana pembangunan, kebijakan sektoral, dll.) Serta prakarsa masa lalu yang mengutamakan prinsip berkelanjutan. Dengan demikian, dapat dipahami "meta-strategi" ini bertujuan untuk meningkatkan koherensi kebijakan serta koordinasi lintas sektoral dan multipihak, rasionalisasi penggunaan sumber daya, dan penyederhanaan implementasi kebijakan.

Strategi yurisdiksi REDD + / LED lebih dari sekedar dokumen. Strategi yurisdiksi yang efektif dibangun atas keterlibatan multipihak yang terus berlanjut. Proses ini diyakini tahan lama di dalam pemerintahan politik. Selain itu memiliki fleksibilitas yang cukup untuk menanggapi tantangan dan peluang baru. Proses membangun strategi yurisdiksi yang kuat menghasilkan dokumen "hidup" yang memungkinkan yurisdiksi mengkomunikasikan visi dan prioritasnya kepada konstituen dan mitranya, baik secara internal maupun eksternal, dan menyalurkan keuangan dan inisiatif. Seiring waktu, strategi yurisdiksi yang efektif akan tertanam dalam kebijakan sektoral dan hukum, dan tercermin dalam kemampuan organisasi dasar pemerintah.

Rencana investasi sepatutnya harus melengkapi strategi yurisdiksi dengan memperkuat proses deliberatif yang sedang berlangsung untuk memprioritaskan dan mengoperasikan tindakannya. Proses ini harus berisi muatan yang berharga dan dikemas baik serta memberikan kerangka kerja yang koheren untuk memahami arus keuangan yang ada dan menyalurkan investasi baru (publik dan swasta) untuk memenuhi kebutuhan yurisdiksi yang diuraikan dalam strategi.

Dukungan untuk strategi yurisdiksi dan rencana investasi sebaiknya menghindari pendekatan "transplantasi", di mana apa yang disebut praktik strategi terbaik pengembangan rencana dapat diimpor ke yurisdiksi melalui mitra masyarakat sipil dan komunitas donor yang lebih luas tanpa

sedikit pun memperhatikan kenyataan di lapangan. Pendekatan semacam itu memperkuat insentif bagi yurisdiksi dan mitranya untuk berfokus pada reproduksi bentuk strategi atau rencana yang baik seperti apa bentuknya. Strategi yang bagus selalu dibutuhkan sebelum para-pihak melakukan kerja keras untuk mengidentifikasi masalah utama dan tindakan kritis yang diperlukan untuk menghasilkan transformasi, dan membangun kemampuan fungsional untuk pengembangan strategi (dan implementasi).

Dengan kata lain, dukungan untuk strategi yurisdiksi dan rencana investasi harus menghindari penciptaan insentif bagi mitra dan yurisdiksi yang berfokus pada produksi dokumen strategi yang terlihat bagus namun sebenarnya diputuskan dari proses dan kemampuan di yurisdiksi yang bersifat sepihak. Sebaliknya, dukungan harus ditujukan pada membangun kemampuan untuk merancang dan menerapkan strategi yang kuat yang mengidentifikasi masalah dan tantangan yang dihadapi pemerintah dan mitranya, menjelaskan secara realistis pendekatan untuk memecahkan masalah tersebut, dan menetapkan proses untuk menyesuaikan dan menyesuaikan strategi dari waktu ke waktu.

Perencanaan “Jalur”

Ada banyak yurisdiksi GCF telah terlibat dalam pengembangan strategi REDD + atau LED, yang menghasilkan "strategi" atau "rencana tindakan". Pendanaan melalui skema Jendela A dapat digunakan untuk strategi dan rencana. Meskipun keduanya didukung oleh analisis konteks yang menyeluruh dan teori perubahan yang jelas, tetap ada perbedaan antara keduanya: (i) "Strategi" dapat dipahami sebagai kerangka umum yang mendefinisikan visi jangka menengah atau jangka panjang, dengan jangkauan luas orientasi; sementara (ii) "Rencana" cenderung lebih rinci dan berorientasi operasional, dan dapat mencakup anggaran rinci dan tujuan kuantitatif, kerangka hasil, kerangka kerja manajemen risiko, dan garis besar program (Tabel 1). Terminologi yang digunakan oleh yurisdiksi tertentu mungkin juga mencerminkan persyaratan atau preferensi institusional, dan strategi / rencana REDD + / LED yang ada dan akibatnya persyaratan yang digunakan dapat sangat bervariasi. Sementara beberapa yurisdiksi telah menggunakan istilah "rencana tindakan", yang lain lebih menyukai istilah "rencana investasi", "rencana strategis", atau "rencana pelaksanaan".

Figure 1Table

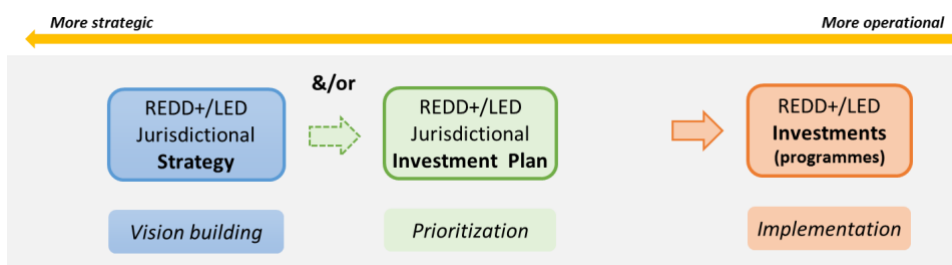


Table 1: Karakteristik generik “strategi” vs “rencana”

(a) Strategi	(b) Rencana
<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen Politis • visit jangka panjang atau menengah (contoh: 10 tahun atau tanpa batasan) • Prioritas strategis umum demi mencapai visi dan tujuan 	<ul style="list-style-type: none"> • Berorientasi operasional (semi-politis atau semi-teknis) • Jangka pendek/menengah (contoh: 5 tahun) <p>Dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Tujuan kuantitatif yang terperinci ✓ melalui 'paket' tindakan (rangkaian proyek/program yang koheren) yang diprioritaskan ✓ yang telah dihitung biayanya (anggaran) ✓ dungeon summer keuangan yang teridentifikasi dan/atau dijamin sebagai bagian dari strategy pembiayaan (berpotensi dikaitkan dungeon mechanism keuangan) ✓ untuk diimplementasikan melalui timeline/urutan tertentu ✓ Termonitor dan terevaluasi menggunakan kerangka hasil keseluruhan menggunakan indikator kinerja (terkait sistem M&E) ✓ dengan resiko yang teridentifikasi dan terkelola ✓ dan mekanisme koordinasi pengawasan lintas sektoral dan multipihak yang memungkinkan pengelolaan adaptif

Jalur perencanaan yang tepat akan tergantung pada konteks spesifik masing-masing wilayah yurisdiksi. "Strategi" yang sangat generik sekalipun tidak mungkin cukup untuk mengarahkan dan mengkoordinasikan investasi, atau menjadi dasar kuat untuk memobilisasi keuangan. Tetapi sementara itu beberapa yurisdiksi dapat secara langsung bertujuan untuk mengembangkan "rencana" yang terperinci dan nyata, yang lain mungkin lebih memilih untuk mendapatkan kemajuan melalui "strategi" yang lebih umum terlebih dahulu, misalnya saat kondisinya tepat sebelum transisi politik, atau sebagai tonggak penting pertama untuk mengurangi risiko "perencanaan kelelahan".

Akhirnya keputusan akan tergantung pada konteksnya, khususnya: (i) kerangka kebijakan yang ada dan berbagai inisiatif yuridiksi dapat dibangun; (ii) kapasitas kolektif (mitra publik dan swasta) dan tingkat kolaborasi; (iii) tingkat konvergensi antar sektor dan pemangku kepentingan terhadap visi bersama; (iv) persyaratan spesifik dan beragam dari berbagai sumber pembiayaan yang ditargetkan (baik domestik maupun internasional).

Dengan membangun kerangka kerja dan prakarsa kebijakan yang ada, dengan berfokus pada proses partisipatif yang kuat, partisipatif secara sosial dan responsif gender, dan menentukan tujuan yang relevan pada awal harus selalu diingat.

Aspek penting dari proses perencanaan strategis

Dalam proses pengembangan strategi, penyelidikan yang cermat diperlukan untuk mendasari penyebab deforestasi dan perubahan tata guna lahan, bersamaan dengan debat asli tentang hambatan terkait perubahan dan tugas yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan mitranya. Ini akan memandu identifikasi masalah spesifik yang dihadapi yurisdiksi serta pengembangan dan penerapan solusi inovatif dan mungkin unik, yang akan tahan lama dari waktu ke waktu.

Strategi atau rencana yurisdiksi yang berkembang dengan baik harus memberikan "teori perubahan" yang jelas untuk bagaimana yurisdiksi mengurangi penggundulan hutan sesuai dengan target dan komitmen Deklarasi Rio Branco dan dalam jangka panjang mengingat keadaan tertentu di dalam yurisdiksi. Hal ini termasuk:

- penggambaran yang jelas tentang apa yang mendorong perubahan penggunaan lahan dan penggundulan hutan di lapangan di yurisdiksi tertentu;
- identifikasi prioritas yurisdiksi untuk menangani pembalap ini;
- asumsi dimana prioritas ini didefinisikan;
- identifikasi hambatan yang dihadapi dan kebutuhan mata pencaharian baik perempuan maupun laki-laki di dalam masyarakat hutan (terutama yang berasal dari kelompok marginal, seperti perempuan, pemuda, etnis minoritas, penduduk asli, dsb.) di wilayah hukum; dan
- tantangan hukum dan kelembagaan (dan peluang) yang dihadapi yurisdiksi dalam mengembangkan dan menerapkan strateginya (termasuk kemampuan di dalam pemerintah dan di antara mitra masyarakat sipil utama), tuntutan dan peluang kemitraan, berkoordinasi dengan kebijakan dan proses nasional, dan kebutuhan pembiayaan.

Dalam istilah yang paling sederhana, masing-masing strategi atau rencana yurisdiksi perlu mengidentifikasi yurisdiksi apa yang akan dilakukan untuk mengatasi penyebab deforestasi dan mencapai targetnya dalam konteks situasi khusus yurisdiksi, bagaimana hal itu akan membangun sebuah proses untuk menerapkannya, dan mengapa pendekatan yang teridentifikasi akan efektif.

Sebagai bagian dari hal ini, dan sesuai dengan gagasan bahwa pendekatan yurisdiksi harus "berbasis masalah", yurisdiksi dan mitranya perlu berfokus pada identifikasi dan karakterisasi yang hati-hati atas masalah "internal" dan "eksternal" dari tata kelola dan organisasi. Kemampuan yang dihadapinya dalam mencoba mengembangkan dan menerapkan strategi untuk mengurangi deforestasi; mengapa masalah khusus ini penting bagi kinerja pemerintah dan mitranya; dan bagaimana mereka bisa diatasi. Akibatnya, proses pengembangan strategi atau rencana yurisdiksi harus mencakup penilaian yang jujur dan terus terang mengenai kemampuan pelaksanaan yurisdiksi dan masalah yang dihadapi dalam upaya mengurangi deforestasi.

Yurisdiksi perlu menganalisis di mana mereka berada di jalur perencanaan "REDD + / LED" mereka (Gambar 1), dan menentukan apa yang diperlukan untuk penerapan strategi dan mobilisasi strategis, efektif, dan efisien. Hal ini dapat diukur terhadap unsur-unsur yang disajikan pada Tabel 1 (b). Panduan lebih lanjut untuk yurisdiksi tentang bagaimana melakukan penilaian ini diuraikan dalam kerangka proposal.

Strategi regional

Dalam beberapa kasus, yurisdiksi tetangga mungkin ingin berkolaborasi dalam pengembangan strategi regional dan multi-yurisdiksi dan / atau rencana investasi. Keuntungan dari pendekatan semacam itu mencakup peningkatan kemampuan untuk menangani pemicu regional dan masalah umum, koordinasi dan pembagian sumber daya, penyelarasan yang lebih baik dengan kebijakan dan program nasional, dan pertukaran informasi dan pembelajaran. Dalam pendekatan seperti itu, harus ada identifikasi yang jelas tentang keuntungan dari pendekatan regional dan juga evaluasi terhadap biaya potensial. Secara khusus, strategi regional tidak boleh datang dengan

mengorbankan kemampuan dan proses penguatan untuk REDD + dan pengembangan emisi rendah di dalam yurisdiksi individual.

Risiko yang terkait dengan strategi yurisdiksi dan rencana investasi

Setiap dukungan untuk pengembangan strategi yurisdiksi dan rencana investasi harus menyadari (dan berusaha untuk mengurangi jika memungkinkan) risiko yang terkait dengan intervensi tersebut. Minimal, GCF ingin memastikan bahwa setiap intervensi dalam program ini tidak memperburuk keadaan dengan menciptakan insentif yang tidak tepat, menerapkan tuntutan yang tidak realistis, mengganggu upaya menjanjikan yang telah dilakukan, atau memperkuat atau memperburuk ketidaksetaraan yang ada (misalnya sosial, gender, dll.) . Ini memerlukan penilaian risiko sebelum mengambil keputusan mengenai pendanaan. Ini termasuk:

- 1. Formulir di atas fungsi** - dukungan untuk pengembangan strategi yurisdiksi dan rencana investasi harus menghindari penciptaan dan / atau penguatan insentif di yurisdiksi target untuk mengembangkan strategi yang terlihat seperti jenis rencana yang bersifat internasional. praktik terbaik yang disarankan adalah strategi yang baik, daripada membantu yurisdiksi (dan mitranya) untuk melakukan kerja keras dalam membangun / meningkatkan kemampuan fungsional yang dibutuhkan untuk pengembangan dan implementasi strategi yang berhasil.
- 2. Harapan yang tidak realistis** - kemampuan organisasi yang ada dalam yurisdiksi tertentu, yang mencakup kemampuan internal dan juga kemampuan mitra kunci dalam jaringan aktor yang lebih luas yang bekerja dengan yurisdiksi, adalah sumber daya langka yang langka yang sering menjadi hambatan dalam intervensi sektor publik. Perlu dikerahkan dengan hati-hati dan strategis. Pendanaan melalui Jendela A oleh karena itu ditargetkan pada kegiatan / tugas yang layak dilakukan tanpa memberikan harapan yang tidak realistis mengenai yurisdiksi tersebut. Menambahkan peran dan tanggung jawab baru dalam kasus pemerintah yang lemah dan rapuh dapat memperburuk keadaan. Pada saat yang sama, pendanaan melalui jendela ini harus mendorong yurisdiksi untuk berbuat lebih banyak. Pegawai negeri sipil perlu memahami tidak hanya kendala mereka, tapi juga peluang yang harus mereka hadapi dengan agenda baru.
- 3. Gangguan proses pemangku kepentingan yang sedang berlangsung** - banyak pemerintah GCF telah terlibat dalam beberapa bentuk proses pemangku kepentingan dalam upaya mereka untuk mengatasi deforestasi dan tantangan yang terkait. Dukungan yang diberikan melalui Jendela A harus berhati-hati agar tidak mengganggu proses yang sedang berjalan, namun bila memungkinkan, hendak membangun dan meningkatkannya.
- 4. Merusak hubungan tepercaya** - beberapa pemerintah GCF telah mengembangkan kemitraan dengan organisasi masyarakat sipil lokal dan regional (terkadang sebagai konsorsium yang luas). Kemitraan ini sering mendukung (dan diperkuat oleh) proses pemangku kepentingan yang berkelanjutan. Dukungan yang diberikan melalui Jendela A, termasuk pekerjaan awal untuk memilih "mitra yang bertanggung jawab" untuk yurisdiksi, seharusnya tidak merusak hubungan yang ada antara pemerintah dan mitra masyarakat sipilnya.
- 5. Perubahan politik dan administratif** - mencatat bahwa dukungan politik tingkat tinggi dan kemampuan administratif sangat penting bagi keberhasilan strategi dan rencana investasi yurisdiksi, yurisdiksi dan mitranya harus memastikan adanya sistem untuk memungkinkan kelangsungan proses di luar siklus pemilihan. Ini memerlukan peningkatan kapasitas dan

kontinuitas di tingkat pegawai negeri sipil dan mendapatkan dukungan dari sebuah administrasi baru jika terjadi perubahan.

- 6. Memperkuat ketidaksetaraan yang ada** - mendukung pengembangan strategi yurisdiksi dan rencana investasi harus menghindari penguatan atau perburuk ketidaksetaraan (misalnya sosial, gender, dll.) Masyarakat di dalam dan di sekitar yurisdiksi. Upaya untuk memulihkan dan meningkatkan hutan yang tidak memperhitungkan pemangku kepentingan yang mengakses, mengandalkan dan menggunakan hutan untuk kelangsungan hidup mereka (misalnya perempuan dan laki-laki di masyarakat hutan) secara tidak sengaja dapat menyebabkan dampak negatif pada penghidupan para pemangku kepentingan ini, terutama yang lebih terpinggirkan (misalnya perempuan, pemuda, masyarakat adat, dll). Dengan demikian, dukungan yang diberikan melalui Jendela A harus berusaha untuk mempromosikan inklusi sosial, pemberdayaan perempuan dan kesetaraan jender.

4. Kegiatan yang Didukung di bawah Jendela Pendanaan A

Sebagaimana dinyatakan dalam Dokumen Kerangka untuk Ikrar Norwegia-GCF, tujuan keseluruhannya adalah untuk mendukung anggota GCF dan mitranya di negara-negara dan kawasan hutan tropis GCF yang inovatif untuk menerapkan Deklarasi Rio Branco untuk mengurangi deforestasi 80% pada tahun 2020 dan untuk membangun sebuah yayasan untuk pengurangan lebih lanjut pada periode pasca-2020.

Jendela A bertujuan untuk melakukan ini melalui hibah hingga US \$ 400.000 per yurisdiksi anggota untuk mendukung upaya untuk membangun (dan memperkuat) kemampuan, proses, dan kemitraan yang dibutuhkan untuk menghasilkan, menerapkan, dan menyesuaikan strategi untuk mengurangi deforestasi pada skala dan mempromosikan yang rendah pengembangan emisi, mengingat keadaan tertentu di 11 yurisdiksi. Pendekatan regional dikembangkan oleh kelompok yurisdiksi anggota (misalnya anggota Amazon Peru) juga berhak mendapatkan dukungan.

Yurisdiksi GCF yang berpartisipasi dalam prakarsa ini harus menunjukkan keinginan untuk mengembangkan strategi yurisdiksi dan rencana investasi yang: (i) membangun usaha perencanaan yurisdiksi yang ada; (ii) pikirkan secara kreatif tentang apa sebenarnya masalah dan peluang utama; (iii) mengidentifikasi tindakan prioritas terhadap pemanfaatan lahan dan hutan yang lebih baik; dan (iv) memperkuat kapasitas perencanaan dan pelaksanaan.

Bila memungkinkan, dukungan yang disalurkan melalui jendela ini harus mendorong yurisdiksi, bersama dengan mitranya, untuk berpikir di luar batasan pengembangan strategi tradisional dan untuk menciptakan sebuah proses yang akan memperkuat kemampuan di dalam pemerintah, serta hubungan dengan masyarakat sipil dan pemangku kepentingan lainnya, terutama yang lebih terpinggirkan, seperti perempuan, pemuda, masyarakat adat, etnis minoritas, dan lain-lain. Juga harus diakui bahwa strategi yang berhasil harus terbuka untuk pendekatan baru dan eksperimental untuk pemecahan masalah. Berdasarkan penilaian sendiri dan sesuai dengan konteks spesifik, kebutuhan dan peluang masing-masing yurisdiksi, yurisdiksi yang berbeda dapat mengajukan berbagai pendekatan terhadap pengembangan strategi dan rencana investasi.

Dengan berbagai komitmen dan kemampuan di seluruh anggota GCF (seperti tercantum dalam bagian 3 di atas), dukungan yang diberikan melalui jendela pendanaan A harus cukup fleksibel untuk

mengakomodasi berbagai titik awal dan konteks khas masing-masing yurisdiksi GCF. Untuk itu, kegiatan yang layak mendapat dukungan di bawah jendela pendanaan A dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori besar:

1. pengembangan strategi yurisdiksi baru dan rencana investasi;
2. penjabaran dan penyempurnaan strategi yurisdiksi dan rencana investasi yang ada; dan
3. pengembangan produk pelengkap dan proposal yang membangun strategi yurisdiksi dan rencana investasi yang ada dan ditargetkan pada sumber pendanaan yang lebih besar seperti Dana Iklim Hijau.

Pengembangan strategi yurisdiksi baru dan rencana investasi

Di yurisdiksi yang tidak memiliki strategi atau rencana REDD + / LED, membangun visi bersama dan menentukan tindakan strategis dan struktur yang dibutuhkan untuk mencapainya akan menjadi langkah awal yang penting. Yurisdiksi ini harus sangat mempertimbangkan penggunaan dukungan yang disalurkan melalui jendela ini untuk pengembangan partisipatif dari visi strategis dan operasional untuk yurisdiksi, sehingga membingkai langkah selanjutnya menuju implementasi.

Ada nilai bagus untuk yurisdiksi ini dalam menggunakan dukungan ini untuk membangun dan / atau memperkuat kemampuan internal, untuk membangun proses multipihak, untuk menilai tantangan dan peluang spesifik yang dihadapi yurisdiksi tertentu, untuk mulai memetakan jalur menuju pengembangan emisi rendah, dan untuk mengidentifikasi masalah yang dapat dipecahkan berdasarkan sumber daya dan kemampuan yang ada serta yang memerlukan dukungan dan kemitraan tambahan.

Untuk yurisdiksi ini, intinya adalah mengambil langkah awal untuk membangun program yurisdiksi yang kuat untuk REDD + dan LED. Dalam hal ini, sangat penting untuk menghindari risiko meminta yurisdiksi untuk melakukan terlalu banyak peran dan tanggung jawab baru atau meningkatkan harapan yang tidak realistis (seperti yang dibahas di atas). Singkatnya, dukungan yang disalurkan melalui jendela pendanaan ini perlu memenuhi yurisdiksi di mana mereka berada, menyadari bahwa banyak orang harus berjalan sebelum mereka dapat berjalan.

Elaborasi dan penyempurnaan strategi yurisdiksi dan rencana investasi yang ada

Inisiatif ini juga mengakui bahwa banyak - jika tidak sebagian besar - dari yurisdiksi GCF telah memiliki semacam strategi / rencana REDD + / LED. Namun, hal ini mungkin bersifat parsial (baik spasial atau dalam hal pendorong / agen penggundulan hutan yang ditangani) atau ketinggalan jaman. Oleh karena itu, beberapa yurisdiksi dapat memprioritaskan upaya untuk memperluas, memperbarui, menjelaskan, dan / atau menyempurnakan strategi atau rencana REDD + / LED yang ada. Sebuah yurisdiksi selanjutnya dapat memperbaiki strategi atau rencana yang ada dengan melakukan analisis tambahan tentang penyebab deforestasi yang mendasari di wilayah hukum, atau memperbaiki hubungan dengan prakarsa nasional dan global untuk mengurangi deforestasi (misalnya strategi perubahan iklim atau REDD + nasional, atau yang baru Deklarasi York tentang Hutan).

Pendanaan di bawah Jendela A juga dapat digunakan untuk memperbarui strategi yang ada sehingga mereka dapat merefleksikan proses yurisdiksi relevan lainnya yang terjadi, seperti prakarsa rantai pasokan komoditas, atau untuk meningkatkan proses pemangku kepentingan, atau merespons dengan lebih baik kebutuhan dan kekhawatiran perempuan, masyarakat adat orang, atau kelompok terpinggirkan lainnya. Beberapa yurisdiksi juga dapat memilih untuk melengkapi strategi dan rencana yang ada dengan rencana investasi yang lebih rinci dan operasional, yang mencakup tindakan biaya dan paket (sebuah program), mengikuti teori perubahan yang jelas, dengan kerangka kerja kerangka kerja dan kerangka pengelolaan terpadu yang kuat.

Pengembangan produk pelengkap dan proposal

Bagi yurisdiksi yang telah memiliki rencana REDD / LED yang relevan agar tidak memerlukan pemutakhiran yang signifikan, pendanaan di bawah Jendela A dapat digunakan untuk mendukung pengembangan produk dan proposal komplementer yang membangun strategi dan rencana investasi yurisdiksi yang ada untuk memfasilitasi implementasi spesifik. kemitraan dan / atau ditargetkan pada sumber pendanaan yang lebih besar, seperti Green Climate Fund.

Dukungan semacam itu dapat digunakan untuk melakukan penilaian finansial dan ekonomi terhadap pembiayaan yang ada serta penilaian opsi pendanaan tambahan sebagai bagian dari rencana investasi yurisdiksi yang lebih luas. Mengembangkan pendekatan terpadu yang menyatukan berbagai aliran pembiayaan yang relevan, apakah benar-benar "REDD + / LED" atau lebih tepatnya REDD + / LED-relevan (dari sumber publik dan swasta, domestik dan internasional) dapat merupakan langkah penting menuju pelaksanaan dan kelangsungan hidup strategi yurisdiksi dan rencana investasi.

Langkah-langkah spesifik yang diperlukan untuk mengembangkan pendekatan semacam itu akan bervariasi sesuai dengan konteks masing-masing yurisdiksi, namun dapat menggabungkan elemen berikut:

Penilaian finansial dan ekonomi atas tindakan yang diusulkan: Membangun kasus untuk pelaksanaan pembiayaan dimulai dengan penilaian finansial dan ekonomi atas berbagai tindakan yang diajukan. (i) Analisis ekonomi - analisis biaya dan manfaat yang mengalir ke / dari masyarakat - dapat berarti (tergantung pada konteks program) monetisasi manfaat non-pasar, internalisasi eksternalitas, dan akuntansi untuk subsidi, antara lain. (ii) Analisis keuangan mengacu pada analisis biaya dan pendapatan yang mengalir ke / dari program.

Memetakan arus keuangan penggunaan lahan saat ini: Banyak sumber keuangan yang relevan dengan REDD + sudah mengalir ke dalam yurisdiksi. Ada yang secara langsung mendukung tujuan REDD + / LED (investasi hijau) namun tidak sesuai dan terkoordinasi secara memadai, memastikan sinergi yang diperlukan. Sumber daya lain (investasi abu-abu) benar-benar akan menentang agenda REDD + / LED, yang mewakili beberapa kali tingkat besarnya keuangan hijau.

Pemetaan arus keuangan dan karakteristik penggunaan lahan yang mendukung atau menentang agenda REDD + / LED merupakan langkah awal yang berguna untuk mengidentifikasi kesenjangan

pembiayaan, serta kesempatan untuk menyelaraskan atau mengalihkan arus pendanaan dengan lebih baik.²

Berdasarkan penilaian ini, rencana pembiayaan dapat dikembangkan untuk mengidentifikasi jumlah, instrumen (hibah, pinjaman, jaminan, pembayaran berbasis hasil, ekuitas), yang diperlukan untuk membiayai berbagai jenis proyek serta sumber potensial yang relevan (publik, swasta, domestik, internasional).

Monitoring, evaluasi, dan pelaporan

Pelaporan reguler akan menjadi bagian integral dari pemantauan dan evaluasi untuk informasi yang sistematis dan tepat waktu mengenai kemajuan. Semua kegiatan yang didukung di bawah jendela pendanaan A harus mencakup ketentuan untuk pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kemajuan dengan cara yang memungkinkan konsolidasi dan penggabungan bersama di beberapa aktor dan sektor. Pendekatan rekursif atau adaptif terhadap pengembangan, penyempurnaan, dan implementasi strategi yurisdiksi dan rencana investasi juga akan membantu yurisdiksi memahami hubungan timbal balik antara berbagai kebijakan, dampaknya terhadap pengemudi, dan pada akhirnya peran mereka dalam mengurangi emisi.

Ketentuan untuk pemantauan, evaluasi, dan pelaporan harus mencerminkan kondisi awal dan konteks anggota GCF yang berbeda dan harus didasarkan pada kerangka hasil yang kuat dan realistis untuk setiap sistem pemantauan dan evaluasi yurisdiksi serta sistem pemantauan dan evaluasi yang fungsional dan pragmatik. Seiring waktu, saat yurisdiksi bergerak dari pembangunan dan penyempurnaan implementasi strategi dan rencana investasi, kerangka hasil harus lebih rinci, termasuk penciptaan metrik, alat, dan metodologi kinerja yang harmonis; penggunaan sistem bersama untuk memantau driver dan penerapan kebijakan lintas proyek; memantau pelaksanaan keuangan; dan menghormati pengamanan umum.

Sistem ini juga dapat mencakup pemantauan upaya di tingkat nasional / internasional untuk mengidentifikasi sinergi, menghindari redudansi, dan mengenali peluang untuk memanfaatkan upaya yurisdiksi.

Kebijakan dan prosedur UNDP akan memandu proses pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Bagi Pihak yang Bertanggung Jawab, ini mencakup (a) laporan triwulanan; (b) jika jangka waktu perjanjian melebihi satu (1) tahun, laporan tahunan; dan (c) laporan akhir. Garis waktu pelaporan akan tergantung pada panjang setiap proyek dan akan disepakati antara UNDP dan Pihak yang Bertanggung Jawab. Mitra harus memastikan biaya pemantauan dan pelaporan tercermin dalam anggaran. Mitra juga harus memberi anggaran untuk laporan akhir untuk mengilustrasikan hasil dan mengumpulkan praktik terbaik dan pelajaran yang dapat dibagi dengan yurisdiksi lain dan menginformasikan pemrograman masa depan. UNDP akan menyediakan template pelaporan. Selain itu, kegiatan yang dilakukan oleh Pihak yang Bertanggung Jawab juga dapat dikenai evaluasi dan / atau audit independen sebagai bagian dari proyek global REDD + UNDP.

² Panduan tambahan tentang bagaimana hal ini dapat dilakukan akan disediakan untuk membantu yurisdiksi dalam melakukan latihan pemetaan keuangan di bawah Jendela A.

5. Langkah yang Diharapkan untuk Berpartisipasi dalam Inisiatif ini

Ada dua langkah utama untuk berpartisipasi dalam inisiatif ini: i) melakukan penilaian diri awal untuk menetapkan garis dasar; dan ii) terlibat dengan pemangku kepentingan. Langkah-langkah ini harus dilakukan oleh yurisdiksi dan mitranya dalam mempersiapkan proposal di bawah Jendela A. Bimbingan mengenai pengembangan proposal disediakan dalam template.

Garis dasar (self assessment awal)

Di banyak yurisdiksi, banyak yang telah dilakukan untuk mencapai jalan menuju pembangunan pedesaan dengan emisi rendah, termasuk pengembangan strategi atau rencana yurisdiksi. Sangat penting untuk membangun usaha masa lalu jika relevan.

Apakah suatu yurisdiksi tertentu sudah memiliki strategi / rencana REDD + / LED di tempat, langkah pertama untuk berpartisipasi dalam inisiatif ini adalah penilaian diri yang cepat (oleh yurisdiksi dan mitranya) dari:

- Apa yang telah dilakukan dan dicapai di tingkat yurisdiksi: kerangka strategis yang ada dengan relevansi dan kelengkapan saat ini, serta sejauh mana hal itu telah diterjemahkan ke dalam kerangka kebijakan, hukum, dan kelembagaan yurisdiksi. Mungkin juga relevan untuk menilai apakah elemen kunci dari operasionalisasi pendekatan keseluruhan yurisdiksi yang disebutkan dalam Tabel 1b sudah ada;
- Inisiatif dan peluang baru yang ada di dalam yurisdiksi maupun di luar (di tingkat global atau nasional) yang dapat digunakan oleh yurisdiksi, dan sejauh mana kerangka strategis yang ada saat ini mengkapitalisasinya.

Penilaian terhadap usaha yurisdiksi di tempat harus mencakup pemetaan pemangku kepentingan (termasuk yang lebih terpinggirkan, seperti perempuan, masyarakat adat, etnis minoritas, dan lain-lain), dan kebijakan; pilihan keuangan yang ada; kapasitas kelembagaan; dan kemitraan yurisdiksi (misalnya produsen komoditas, organisasi konservasi). Ini juga harus mencakup analisis tentang bagaimana usaha yurisdiksi ini bersifat inklusif secara sosial dan responsif gender. Pengertian driver juga penting. Bukan hanya pembalap langsung (yaitu pertanian komersial, pembalakan liar) namun terutama pendorong utama (yaitu kapasitas kelembagaan, kerangka hukum, kekuatan pasar) dan bagaimana kaitannya dengan masing-masing pemangku kepentingan langsung tertentu. Kadang-kadang pemangku kepentingan sangat seragam dalam yurisdiksi tetapi juga dapat bervariasi secara substansial dari satu bagian yurisdiksi yang lain.

Yurisdiksi juga harus mempertimbangkan kegiatan REDD + saat ini, pemangku kepentingan, dan kebijakan dan tindakan yang ada dalam yurisdiksi. Selain itu, sinopsis sistem pemantauan dan evaluasi yang ada untuk REDD + dan implementasi (termasuk pemantauan pemangku kepentingan) adalah kesempatan untuk menilai upaya saat ini, mengidentifikasi kesenjangan, dan alamat sebagai bagian dari program.

Penilaian pendahuluan cepat terhadap sumber pembiayaan dan peluang yang ada juga dapat menjadi dasar yang berguna untuk penilaian keuangan dan ekonomi berikutnya dan potensi pengembangan strategi pembiayaan terpadu (lihat di bawah).

Pemetaan kapasitas yang ada (manusia, kelembagaan) akan memudahkan penilaian seberapa jauh yurisdiksi dari mampu mengisi kesenjangan dan memanfaatkan peluang. Mengingat masalah pergantian staf yang tinggi dan kurangnya memori kelembagaan yang mempengaruhi banyak yurisdiksi GCF, penilaian awal juga harus menilai pergantian staf dan upaya yurisdiksi untuk menjamin keberlanjutan program yurisdiksi di seluruh administrasi politik.

Perencanaan investasi di tingkat yurisdiksi harus dilakukan dalam kemitraan dengan badan-badan non-pemerintah. Dalam banyak kasus, kemitraan sudah ada. Ini harus dimasukkan ke dalam garis dasar serta penilaian kapasitas untuk mengembangkan rencana investasi.

Penilaian diri yang menyeluruh bisa sangat memakan waktu dan sumber daya yang intensif untuk yurisdiksi. Sebaliknya, GCF menyadari bahwa mempersiapkan partisipasi dalam jendela pendanaan ini memerlukan penilaian cepat yang dilakukan oleh yurisdiksi dan mitranya, berdasarkan materi dan pengetahuan yang ada. Template yang menyertainya memberikan panduan lebih lanjut untuk yurisdiksi dalam hal ini.

Bergantung pada kebutuhan strategis dan peluang yang teridentifikasi, penilaian yang lebih rinci dapat dilakukan sebagai bagian dari latihan perencanaan strategis dengan menggunakan sumber keuangan di bawah Jendela A.

Melibatkan pemangku kepentingan

Dialog dengan pemangku kepentingan di sektor terkait sangat penting untuk memastikan bahwa mereka membeli tujuan dan berkolaborasi dalam perancangan dan pelaksanaan tindakan yang disepakati bersama. Ini termasuk pegawai negeri sipil dari berbagai kementerian; masyarakat yang tinggal dan menggunakan sumber daya hutan di wilayah hukum; pelaku sektor swasta, termasuk produsen komoditas dan pembeli; organisasi masyarakat sipil; dan lembaga penelitian dan pendidikan. Hal ini sering merupakan tantangan nyata mengingat rendahnya tingkat organisasi kelompok pemangku kepentingan, khususnya petani pedesaan. Upaya yang disengaja juga perlu dilakukan untuk memastikan bahwa pemangku kepentingan yang lebih terpinggirkan (misalnya perempuan, pemuda, perempuan dan laki-laki miskin, masyarakat adat, etnis minoritas, dan lain-lain) terlibat secara aktif dalam proses perencanaan dan pelaksanaan. Hal ini pada gilirannya dapat memperbaiki perkembangan sosio-ekonomi dan dampak lingkungan dan mendorong keberlanjutan jangka panjang. Pada akhirnya, keseimbangan pragmatis harus ditemukan dalam melibatkan pemangku kepentingan, untuk memastikan partisipasi dan pembelian mereka yang berarti tanpa terlalu membebani proses perencanaan strategis. Bukti partisipasi pemangku kepentingan harus dicatat (dipecah oleh konstituen dan gender, paling tidak). Panduan lebih lanjut mengenai keterlibatan pemangku kepentingan, termasuk bagaimana melibatkan pemangku kepentingan yang lebih terpinggirkan, seperti masyarakat adat dan perempuan, diuraikan dalam kerangka untuk Jendela A.